BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mencerminkan upaya peneliti untuk mengidentifikasi perbandingan dan menghasilkan ide-ide baru yang dapat menginspirasi penelitian berikutnya. Selain itu, tinjauan literatur memiliki peran penting dalam membangun dasar penelitian serta menyoroti keunikan penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini merangkum temuan utama dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian saat ini, yaitu implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana abrasi di Pantai Ancol Maras Kabupaten Seluma.

Penelitian yang dilakukan oleh Suwarji, Kholidiyah Muffaroh, Ikka Puspitas Sari (2024) yang berjudul "Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Abrasi Pantai di Kabupaten Kendal (Studi Kasus Pesisir Pantai Sendang Sikucing)", Penelitian ini merupakan studi deskriptif kualitatif yang menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam menangani abrasi pantai di Kabupaten Kendal, dengan studi kasus di kawasan pesisir Pantai Sendang Sikucing. Informan dalam penelitian ini berjumlah empat orang. Data dikumpulkan melalui teknik observasi yang dilengkapi dengan wawancara terhadap informan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif, yakni dengan menganalisis seluruh data yang telah dikumpulkan, kemudian disajikan secara kualitatif deskriptif berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan teori model implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle sebagai landasan teoretis, yang dipilih karena relevansinya dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam menangani abrasi pantai di kawasan Pantai Sendang Sikucing selama empat tahun terakhir, sejak 2019, melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan desa untuk melakukan pembenahan dan penanggulangan. Namun, langkah-langkah yang diambil masih kurang optimal, karena terdapat beberapa titik di kawasan pesisir yang belum

sepenuhnya ditangani secara efektif. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah pada fokus, teori dan lokasi penelitian. Fokus penelitian penulis implementasi kebijakan penanggulangan bencana abrasi, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Abrasi Pantai. Teori yang penulis gunakan adalah teori implementasi kebijakan dari David C. Korten sedangkan penelitian terdahulu teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle. Lokasi penelitian penulis di Kabupaten Bengkulu Selatan sedangkan penelitian terdahulu di Kabupaten Kendal.

Penelitian yang dilakukan oleh Vibriza Juliswara, Rusman Rapinus Manik, Djuniawan Karnadjaja (2022) yang berjudul "Implementasi Kebijakan Publik Tentang Model Pengurangan Resiko Bencana Dengan Pendekatan Pada Masyarakat Dalam Program Desa Tahan Bencana Di Daerah Istimewa Yogyakarta". Frekuensi bencana yang meningkat di Indonesia memicu kekhawatiran pemerintah dan masyarakat, khususnya di wilayah rawan bencana. Sebagai respons, BNPB meluncurkan program Destana (Desa Tangguh Bencana), yang diimplementasikan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) oleh BPBD DIY. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan program tersebut, dengan data diperoleh melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan BPBD DIY telah membentuk 243 desa tangguh bencana di empat kabupaten dan satu kota di DIY. Program ini melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi potensi bencana, melakukan pencegahan, memahami dampak bencana, dan mempelajari penanggulangannya. Edukasi dan pembentukan kelompok relawan juga menjadi bagian dari program ini. Kesimpulannya, implementasi Destana di DIY berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat kesiapsiagaan, dan mendorong partisipasi yang terorganisir. Kebijakan ini terbukti efektif dalam pengurangan risiko bencana dan dapat menjadi model bagi wilayah lain. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah pada fokus dan lokasi penelitian. Fokus penelitian penulis implementasi kebijakan penanggulangan bencana abrasi, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada Implementasi Kebijakan

Publik Tentang Model Pengurangan Resiko Bencana Dengan Pendekatan Pada Masyarakat Dalam Program Desa Tahan Bencana. Lokasi penelitian penulis di Kabupaten Bengkulu Selatan sedangkan penelitian terdahulu di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hilmi Rozaldi, Muhammad Khoirul Anwar (2024) yang berjudul "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir Di Kawasan Pesisir Kabupaten Tanggerang". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya efektivitas penanggulangan banjir di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, yang menunjukkan indeks ketahanan wilayah, kesiapsiagaan, dan kapasitas pelaksanaan yang rendah. Fokus penelitian adalah evaluasi penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Bencana. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis mengacu pada teori Van Metter dan Van Horn, dengan indikator seperti tujuan kebijakan, sumber daya, koordinasi, dan kondisi lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar kebijakan belum diterapkan maksimal, dengan dampak yang tidak signifikan. Keterbatasan sumber daya BPBD, seperti kualitas SDM, anggaran, dan material, menjadi kendala utama. Meskipun hubungan antarorganisasi cukup baik, koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat, khususnya di Desa Tanjung Burung dan Tanjung Pasir, masih lemah. Pelaksana memiliki sikap positif terhadap kebijakan, tetapi diperlukan langkah preventif dan realistis untuk meningkatkan efektivitas. Faktor ekonomi, sosial, dan politik juga belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan secara optimal. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah pada fokus, teori dan lokasi penelitian. Fokus penelitian penulis implementasi kebijakan penanggulangan bencana abrasi, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir. Teori yang penulis gunakan adalah teori implementasi kebijakan dari David C. Korten sedangkan penelitian terdahulu teori implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn. Lokasi

penelitian penulis di Kabupaten Bengkulu Selatan sedangkan penelitian terdahulu di Kabupaten Tanggerang.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Indarti, Reni Insyiroh, Titi Darmi (2023) yang berjudul "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu". Penelitian ini membahas peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu dalam menangani bencana banjir, khususnya di Kelurahan Rawa Makmur. Tujuannya adalah untuk menganalisis sejauh mana BPBD berperan dalam penanggulangan banjir. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus pada peran BPBD. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis melalui reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPBD dalam menanggulangi banjir belum optimal meskipun telah menerapkan prinsip manajemen bencana, seperti penanganan cepat dan tepat. Namun, upaya penanggulangan yang mencakup kebijakan, pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi masih belum terealisasi dengan maksimal, sehingga efektivitasnya perlu ditingkatkan. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah pada fokus dan lokasi penelitian. Fokus penelitian penulis implementasi kebijakan penanggulangan bencana abrasi, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu Dalam Penanggulangan Bencana Banjir. Lokasi penelitian penulis di Kabupaten Bengkulu Selatan sedangkan penelitian terdahulu di Kota Bengkulu.

2.2 Konsep Kebijakan

2.2.1 Pengertian Kebijakan

Secara umum, istilah "kebijakan" atau "*policy*" merujuk pada langkah-langkah atau keputusan yang dibuat oleh individu, entitas, atau kelompok, seperti pejabat pemerintah, organisasi, atau kelompok tertentu dalam suatu bidang kegiatan. Kebijakan publik mencerminkan keputusan yang diambil atau bahkan yang tidak diambil oleh pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya (Agustino dalam Permata, 2020).

Menurut Thomas Dye dalam Subarsono (2006), kebijakan publik meliputi semua pilihan yang dibuat atau diabaikan oleh pemerintah. Dengan kata lain, "*public policy is whatever governments choose to do or not to do*." Konsep ini memiliki cakupan yang sangat luas, mencakup tindakan yang diambil oleh pemerintah serta tindakan yang tidak dilakukan ketika mereka berhadapan dengan berbagai isu publik.

Definisi kebijakan publik menurut Dye mencakup dua aspek utama. Pertama, kebijakan publik merupakan hasil keputusan yang dibuat oleh lembaga pemerintah, bukan dari inisiatif organisasi swasta. Kedua, kebijakan publik melibatkan proses pengambilan keputusan yang mencakup pilihan untuk bertindak atau tidak bertindak, termasuk keputusan untuk tidak melaksanakan program baru atau mempertahankan kondisi yang ada.

Menurut Islamy dalam Jehuman (2018), kebijakan publik adalah serangkaian langkah yang dirumuskan dan dijalankan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu atau berorientasi pada manfaat bagi masyarakat luas. Inti dari konsep ini terletak pada prinsip bahwa kebijakan harus selalu melayani kepentingan masyarakat.

Dengan merangkum definisi-definisi kebijakan publik yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan mencakup serangkaian tindakan yang secara sengaja maupun tidak sengaja diambil oleh individu, kelompok, atau pemerintah. Memahami bahwa kebijakan publik adalah elemen penting dalam administrasi publik, yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat, akan memudahkan upaya dalam mencapai tujuan tertentu.

2.2.2 Ciri-Ciri Kebijakan

Menurut Wahab dalam Permata (2020), kebijakan publik pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang memiliki karakteristik atau keunikan tersendiri. Artinya, kebijakan ini memiliki ciri-ciri khusus yang mungkin tidak dimiliki oleh jenis kebijakan lainnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, ciri-ciri kebijakan publik menurut Wahab dalam Permata (2020) adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan publik adalah upaya yang dirancang secara sengaja untuk mencapai tujuan tertentu, berbeda dari hasil perilaku yang tidak teratur, acak, atau kebetulan. Dalam konteks sistem politik modern, seperti kebijakan pembangunan atau kebijakan sosial, kebijakan publik bukanlah tindakan sembarangan, melainkan tindakan yang telah direncanakan secara matang.
2. Secara mendasar, kebijakan terdiri dari serangkaian tindakan yang saling berkaitan dan membentuk sebuah pola, dengan tujuan untuk mencapai target tertentu. Tindakan-tindakan ini dilaksanakan oleh pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang terpisah satu sama lain.
3. Kebijakan merupakan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh pemerintah di berbagai bidang khusus.
4. Kebijakan publik dapat memberikan dampak baik yang positif maupun negatif. Dari sisi positif, kebijakan publik dapat mencakup serangkaian

langkah yang diambil pemerintah untuk menyelesaikan suatu masalah. Sebaliknya, dari sisi negatif, kebijakan publik bisa berupa keputusan pejabat pemerintah untuk tidak mengambil tindakan tertentu, meskipun intervensi pemerintah dianggap sangat dibutuhkan dalam mengatasi masalah tertentu.

2.2.3 Jenis-Jenis Kebijakan

Menurut James E. Anderson dalam Musdalifah (2021) menjelaskan bahwa jenis-jenis dari kebijakan publik sebagai berikut :

1. *Substantive and Procedural Policies*

   Substantive policy merujuk pada kebijakan yang dinilai berdasarkan inti atau substansi dari masalah yang dihadapi pemerintah. Contoh-contohnya mencakup kebijakan di bidang pendidikan, ekonomi, dan sektor-sektor lainnya.

   Procedural policy merujuk pada kebijakan yang dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan kebijakan (*policy stakeholders*). Sebagai contoh, Undang-Undang tentang pendidikan menetapkan bahwa Departemen Pendidikan Nasional memiliki kewenangan untuk merumuskannya. Namun, dalam praktiknya, penyusunan kebijakan tersebut melibatkan berbagai instansi dan organisasi lainnya, baik yang bersifat pemerintah maupun non-pemerintah, seperti DPR, Departemen Kehakiman, Departemen Tenaga Kerja, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan Presiden yang memberikan persetujuan terhadap undang-undang tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini dikenal sebagai *policy stakeholders*.

2. *Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies*

   Distributive policy adalah kebijakan yang mengatur pembagian layanan atau manfaat kepada individu, kelompok, atau perusahaan. Sebagai contoh, hal ini dapat terlihat dalam kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan pajak.

Redistributive policy adalah kebijakan yang berfokus pada perubahan dalam alokasi kekayaan, kepemilikan, atau hak-hak. Contohnya bisa mencakup kebijakan pembebasan tanah untuk kepentingan publik.

Regulatory policy adalah kebijakan yang menetapkan batasan atau larangan terhadap produksi atau perilaku tertentu. Sebagai contoh, hal ini dapat terlihat dalam kebijakan yang melarang kepemilikan dan penggunaan senjata api.

3. *Material Policy*

   Material policy adalah kebijakan yang mengatur penentuan atau penyediaan sumber daya fisik yang nyata untuk penerima manfaatnya. Sebagai contoh, hal ini dapat terlihat dalam kebijakan pembangunan rumah sederhana.

4. *Public Goods and Private Goods Policies*

   Public good policy adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau layanan oleh pemerintah untuk kepentingan bersama. Sebagai contoh, kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan keamanan dan penyediaan infrastruktur jalan umum.

2.3 Konsep Implementasi Kebijakan

2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi merujuk pada tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana yang telah direncanakan dengan cermat dan rinci. Secara sederhana, implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Menurut Majone Wildavsky dalam Nurdin dan Usman (2002), implementasi dapat dipahami sebagai suatu bentuk evaluasi. Sementara itu, Browne dan Wildavsky dalam Nurdin dan Usman (2002) menyatakan bahwa implementasi adalah pengembangan dari aktivitas yang saling menyesuaikan.

Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2007), implementasi kebijakan, dalam pandangan yang lebih luas, dapat dipandang sebagai

alat administrasi hukum yang melibatkan berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja sama untuk melaksanakan kebijakan dengan tujuan mencapai dampak atau hasil yang diinginkan.

Menurut Nugroho (2004), pada dasarnya, implementasi kebijakan adalah strategi untuk memastikan bahwa suatu kebijakan mencapai tujuannya secara tepat, tanpa lebih atau kurang. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, terdapat dua opsi langkah, yaitu melaksanakan langsung melalui program-program atau melalui penyusunan kebijakan turunan atau lanjutan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Metter dan Horn dalam Agustino (2006), implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok dalam sektor pemerintah maupun swasta. Tindakan-tindakan ini bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan kebijakan.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan melibatkan tiga aspek utama, yaitu: (1) penetapan tujuan atau sasaran kebijakan, (2) pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut, dan (3) pencapaian hasil dari kegiatan yang dilakukan. Dengan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses yang dinamis, di mana para pelaksana terlibat dalam serangkaian tindakan. Hasil akhirnya diharapkan dapat mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam kebijakan.

2.3.2 Pendekatan Implementasi Kebijakan

Dalam perkembangan studi implementasi kebijakan, terdapat dua model pendekatan yang dikenal, yaitu pendekatan dari atas ke bawah (*top-down*) dan dari bawah ke atas (*bottom-up*). Menurut Lester dan Stewart dalam Agustino (2006), istilah "*top-down*" dikenal sebagai "*the command and control approach*" (pendekatan perintah dan kontrol), sementara "*bottom-up*" disebut "*the market approach*" (pendekatan pasar).

a. Pendekatan *Top-down*

Pendekatan ini berpendapat bahwa proses kebijakan dapat dipandang sebagai serangkaian perintah, di mana para pemimpin politik mengemukakan preferensi kebijakan yang jelas. Preferensi tersebut kemudian akan dilaksanakan secara lebih rinci seiring kebijakan bergerak melalui struktur administratif yang mengimplementasikannya.

Pendekatan ini menekankan sejauh mana keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta fokus pada kegiatan yang dilakukan oleh mesin implementasi yang diberi mandat secara sah. Pendekatan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai pemahaman yang perlu dimiliki oleh pelaksana, serta tujuan yang ingin dicapai.

Dalam pendekatan *top-down*, pelaksanaan kebijakan bersifat terpusat dan dimulai dari aktor-aktor di tingkat pusat, dengan keputusan diambil dari level atas. Pendekatan ini berasumsi bahwa keputusan politik atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator atau birokrat di tingkat bawah. Dengan kata lain, pendekatan *top-down* mengevaluasi sejauh mana tindakan pelaksana di tingkat bawah sesuai dengan prosedur dan tujuan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan di tingkat pusat.

b. Pendekatan *Bottom-up*

Pendekatan ini dimulai dengan melibatkan partisipasi seluruh masyarakat dan pelaku swasta dalam pelaksanaan program-program, serta mengevaluasi tujuan pribadi dan organisasi mereka, strategi yang diterapkan, dan jaringan kontak yang telah mereka bentuk. Keunggulan utama dari pendekatan "*bottom-up*" adalah fokusnya pada hubungan formal dan informal yang membentuk jaringan kebijakan yang terlibat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan.

2.3.3 Model Implementasi Kebijakan

Salah satu model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh David C. Korten dalam Tarigan (2008) sebagai pisau analisis. Model ini lebih dikenal sebagai model kesesuaian implementasi kebijakan. Model tersebut menggambarkan pentingnya proses belajar yang berkelanjutan, di mana pelaksanaan kebijakan harus terus disesuaikan dengan kondisi dan dinamika yang terjadi di lapangan.

Menurut David C. Korten, model implementasi kebijakan harus mencakup tiga elemen utama yang ia sebut sebagai model kesesuaian dengan pendekatan proses pembelajaran. Model ini menekankan pentingnya keselarasan antara tiga elemen inti, yaitu kebijakan itu sendiri, proses pelaksanaannya, dan kelompok sasaran yang menjadi target kebijakan.

David C. Korten menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tergantung pada adanya keselarasan antara tiga elemen implementasi. Pertama, kebijakan harus sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. Kedua, kebijakan harus selaras dengan organisasi pelaksana, khususnya dalam hal kemampuan organisasi untuk melaksanakan tugas yang diperlukan oleh kebijakan tersebut. Ketiga, terdapat kesesuaian antara kelompok sasaran dan organisasi pelaksana, sehingga kelompok sasaran dapat menerima manfaat program sesuai dengan upaya yang mereka lakukan.

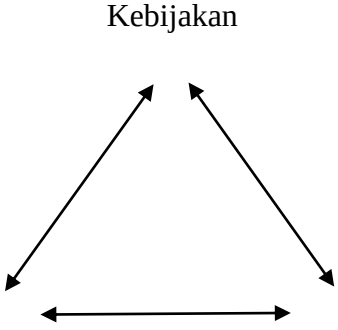

Sasaran Organisasi Pelaksana

Sumber: David C. Korten dalam Tarigan (2008)

Gambar 2.1
Model Kesesuaian Teori David C. Korten

Menurut pola yang dikembangkan oleh Korten, kinerja suatu program tidak akan mencapai hasil yang diharapkan jika tidak ada keselarasan antara tiga elemen utama implementasi program. Ketidaksesuaian ini dapat terjadi jika hasil program tidak memenuhi kebutuhan kelompok sasaran, sehingga hasil tersebut tidak dapat dimanfaatkan atau tidak memberikan pemberdayaan. Selain itu, jika organisasi pelaksana tidak memiliki kapasitas untuk menjalankan tugas yang diperlukan oleh program, maka penyampaian hasil program tidak akan optimal. Begitu pula, jika kelompok sasaran tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi pelaksana, mereka tidak akan mendapatkan manfaat dari program tersebut. Oleh karena itu, kesesuaian antara ketiga elemen implementasi kebijakan menjadi hal yang mutlak untuk memastikan program berjalan sesuai rencana.

Korten menjelaskan bahwa model ini berpusat pada tiga elemen utama dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut Korten, keberhasilan implementasi suatu kebijakan bergantung pada adanya keselarasan antara ketiga unsur , yaitu:

1. Kebijakan

   Menurut Korten, program harus selaras dengan kebutuhan kelompok sasaran. Untuk itu, indikator kebijakan yang baik mencakup beberapa aspek berikut:

a. Tersedianya estimasi anggaran yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan.
b. Adanya strategi yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan.
c. Ditetapkannya kebijakan-kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan kebijakan.
d. Disusunnya perencanaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan kebijakan.

2. Organisasi Pelaksana

Menurut Korten, keberhasilan kebijakan memerlukan kesesuaian antara tugas yang harus dilakukan dalam kebijakan dengan kemampuan organisasi pelaksana. Oleh karena itu, kemampuan implementor, sebagai bagian dari sumber daya manusia, memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi. Sementara itu, Edward II menekankan bahwa disposisi yang mencakup watak dan karakteristik implementor menjadi faktor penting. Jika seorang implementor memiliki disposisi yang baik, ia cenderung melaksanakan kebijakan dengan optimal.

Menurut model Van Meter dan Van Horn, sikap pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan dipengaruhi oleh tiga elemen utama:

a. Kognisi, Tingkat pemahaman dan pengetahuan pelaksana tentang kebijakan yang akan diimplementasikan.
b. Arah Respon, Sikap pelaksana terhadap implementasi kebijakan, apakah mereka cenderung menerima atau menolak kebijakan tersebut.
c. Intensitas Respon, Seberapa kuat atau tegas respon pelaksana terhadap kebijakan, yang dapat memengaruhi kualitas pelaksanaannya.

3. Kelompok sasaran.

Menurut Korten, keberhasilan suatu kebijakan bergantung pada kesesuaian antara kelompok sasaran dan organisasi pelaksana, sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. Sementara itu, Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa faktor kondisi ekonomi, sosial, dan politik (*ekosospol*) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan aktivitas pelaksanaan kebijakan.

Dalam bukunya mengenai kebijakan publik, Riant Nugroho menjelaskan bahwa pada dasarnya implementasi kebijakan selalu melibatkan dua aktor utama, yaitu negara dan masyarakat, yang bekerja bersama. Untuk mencapai implementasi yang efektif, ada lima prinsip pokok yang harus dipenuhi, yaitu yang dikenal dengan istilah “lima tepat” dalam implementasi.

a. Pertama, Tepat kebijakan mengacu pada sejauh mana program yang ada benar-benar menyelesaikan masalah yang ingin diatasi. Kedua, kebijakan harus dirumuskan sesuai dengan karakteristik masalah yang hendak dipecahkan. Ketiga, kebijakan harus disusun oleh lembaga yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan sifat dan tujuan kebijakan tersebut.
b. Tepat pelaksanaannya berarti bahwa aktor yang terlibat dalam implementasi harus sesuai dengan kebijakan yang akan dilaksanakan. Sebagai contoh, program pemberdayaan masyarakat sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah atau LSM yang bekerja sama dengan masyarakat.
c. Tepat target berkaitan dengan tiga hal. Pertama, target yang diberi intervensi harus sesuai dengan rencana dan tidak tumpang tindih. Kedua, target harus dalam kondisi siap untuk menerima intervensi, serta mendukung pelaksanaan kebijakan. Ketiga, implementasi program harus bersifat inovatif atau

memperbaharui kebijakan sebelumnya agar tidak mengulang apa yang sudah dilakukan.

d. Tepat lingkungan berarti bahwa interaksi yang terjadi dalam lingkungan pelaksanaan kebijakan harus selaras dengan interaksi yang ada di luar lingkungan tersebut. Hal ini mencakup faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan.
e. Tepat proses berarti bahwa antara lembaga pelaksana dan masyarakat harus saling memahami aturan yang berlaku. Lembaga pelaksana harus menerima, memahami, dan menjalankan kebijakan sebagai bagian dari tugasnya, sementara masyarakat juga harus menerima, memahami, dan ikut melaksanakan kebijakan tersebut.

2.4 Konsep Pengurangan Resiko Bencana

2.4.1 Pengertian Pengurangan Resiko Bencana

Pengurangan Risiko Bencana (PRB) merujuk pada berbagai upaya yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kerentanan masyarakat dan ekosistem terhadap ancaman bencana, sekaligus memperkuat kemampuan mereka dalam menghadapinya. PRB mencakup tindakan-tindakan seperti pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan, yang semuanya dirancang untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana (Humaedi, 2016).

Dalam pendekatan yang menyeluruh, PRB tidak hanya menitikberatkan pada respons setelah bencana terjadi, tetapi juga berfokus pada upaya pencegahan dan pengurangan risiko jangka panjang. Pendekatan ini melibatkan pemahaman terhadap berbagai ancaman fisik, kerentanan sosial dan ekonomi, serta kemampuan dalam mengelola risiko.

PRB bertujuan utama melindungi kehidupan, mengurangi dampak ekonomi, dan menjaga kelestarian lingkungan. Pendekatan ini

berupaya menggeser paradigma dari sekadar reaksi setelah bencana menuju langkah-langkah proaktif yang menekankan pencegahan dan pengurangan risiko jangka panjang. Selain itu, PRB bertujuan membangun komunitas yang lebih tangguh dan berkelanjutan, dengan kemampuan yang memadai untuk menghadapi ancaman bencana.

2.4.2 Strategi dan Pendekatan Pengurangan Resiko Bencana

Menurut Putera (2020) Dalam upaya mencapai tujuan pengurangan risiko bencana, diperlukan penerapan strategi dan pendekatan yang terpadu. Beberapa pendekatan yang sering digunakan dalam PRB antara lain:

1. Penilaian Resiko

   Penilaian risiko mencakup proses mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko bencana dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti ancaman fisik, kerentanan sosial dan ekonomi, serta kemampuan dalam pengelolaan risiko. Langkah ini penting untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan PRB.

2. Mitigas Bencana

   Mitigasi bencana mencakup upaya untuk mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor yang memicu dan menyebabkan bencana. Langkah-langkah ini dapat meliputi pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana, perbaikan dalam pengelolaan sumber daya alam, serta pengurangan kerentanan masyarakat terhadap ancaman bencana.

3. Persiapan Bencana

Persiapan bencana mencakup langkah-langkah perencanaan dan persiapan sebelum bencana terjadi. Hal ini melibatkan penyusunan rencana tanggap darurat, pelaksanaan latihan simulasi, pemberian edukasi dan pelatihan kepada masyarakat, serta pengembangan sistem peringatan dini yang andal.

4. Respon Bencana

   Respons bencana meliputi langkah-langkah darurat yang diambil selama bencana berlangsung. Tindakan ini mencakup proses evakuasi, pemberian bantuan medis dan pemenuhan kebutuhan pokok, serta memastikan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat.

5. Pemulihan Pasca Bencana

   Pemulihan pasca-bencana mencakup upaya untuk memulihkan kondisi fisik, psikososial, dan ekonomi setelah terjadinya bencana. Proses ini melibatkan rehabilitasi infrastruktur, rekonstruksi hunian, pemulihan sumber penghidupan, serta pemberian dukungan psikososial kepada para korban bencana.

2.4.3 Prinsip-Prinsip Pengurangan Resiko Bencana

Menurut Prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana (PRB) berfungsi sebagai pedoman untuk mengelola risiko bencana secara efektif. Prinsip-prinsip ini memberikan kerangka kerja untuk merancang dan menerapkan strategi PRB yang berkelanjutan. Pada bagian ini, akan dijelaskan prinsip-prinsip utama PRB yang berperan penting dalam mengurangi dampak bencana.

1. Prinsip Keterpaduan

   Prinsip keterpaduan menekankan pentingnya integrasi pengurangan risiko bencana dalam kebijakan, perencanaan, dan tindakan pengembangan di berbagai sektor. Hal ini berarti bahwa PRB harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Prinsip

ini mendorong kolaborasi antara lembaga pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas dalam mengidentifikasi serta mengelola risiko bencana.

2. Prinsip Partisipasi Aktif

   Prinsip partisipasi aktif menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan di setiap tahap pengurangan risiko bencana. Keterlibatan masyarakat memastikan bahwa kebutuhan, pemahaman, dan perspektif lokal diperhatikan dalam perencanaan serta pelaksanaan kebijakan dan program PRB. Prinsip ini juga mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat untuk lebih siap menghadapi ancaman bencana.

3. Prinsip Pendekatan Berbasis HAM

   Prinsip ini menekankan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam pengurangan risiko bencana. Setiap langkah PRB harus mempertimbangkan hak-hak individu dan kelompok yang terdampak bencana, seperti hak atas hidup, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan partisipasi. Prinsip ini mendorong penerapan perlakuan yang adil, inklusif, dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan risiko bencana.

4. Prinsip Pendekatan Berbasis Resiko

   Prinsip pendekatan berbasis risiko menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai risiko bencana dan tindakan yang difokuskan untuk menguranginya. Pendekatan ini melibatkan identifikasi, penilaian, dan pemahaman tentang ancaman bencana, kerentanan, serta kapasitas untuk menghadapi risiko tersebut. Prinsip ini mendorong penggunaan informasi risiko yang tepat dan terkini dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan PRB.

5. Prinsip Keberlanjutan

   Prinsip keberlanjutan menekankan pentingnya pengurangan risiko bencana yang dapat bertahan dalam jangka panjang. Ini melibatkan integrasi PRB ke dalam kegiatan pembangunan

berkelanjutan, sambil mempertimbangkan perubahan iklim dan faktor lingkungan lainnya. Prinsip ini mendorong pengembangan kebijakan, praktik, dan infrastruktur yang tahan terhadap bencana, serta upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko di masa depan.

2.5 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2015), kerangka pemikiran merupakan bagian inti dari penelitian yang mencakup dasar-dasar teoritis yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Kerangka berpikir adalah konsep dasar yang dirancang secara ringkas untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses penelitian, dari tahap awal hingga akhir.

Implementasi kebijakan adalah proses menerapkan keputusan atau kebijakan yang telah dibuat oleh pembuat kebijakan (seperti pemerintah atau organisasi) agar dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata yang berdampak pada masyarakat atau sasaran kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan, karena tanpa implementasi yang baik, tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut tidak akan tercapai.

Penilaian terhadap keberhasilan suatu kebijakan terkait implementasi kebijakan pengurangan resiko bencana abrasi pantai ancol kabupaten seluma dapat dinilai dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari David C. Korten dalam Tarigan (2008) dengan 3 indikator yaitu kebijakan itu sendiri, pelaksanaan kebijakan dan sasaran kebijakan.

Pada ketiga indikator tersebut dapat membantu penulis dalam melihat keberhasilan implementasi kebijakan pengurangan resiko bencana di Pantai Ancol Kabupaten Seluma. Berdasarkan teori dan konsep yang telah

dijelaskan, kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat disajikan melalui ilustrasi grafis atau diagram sebagai berikut:

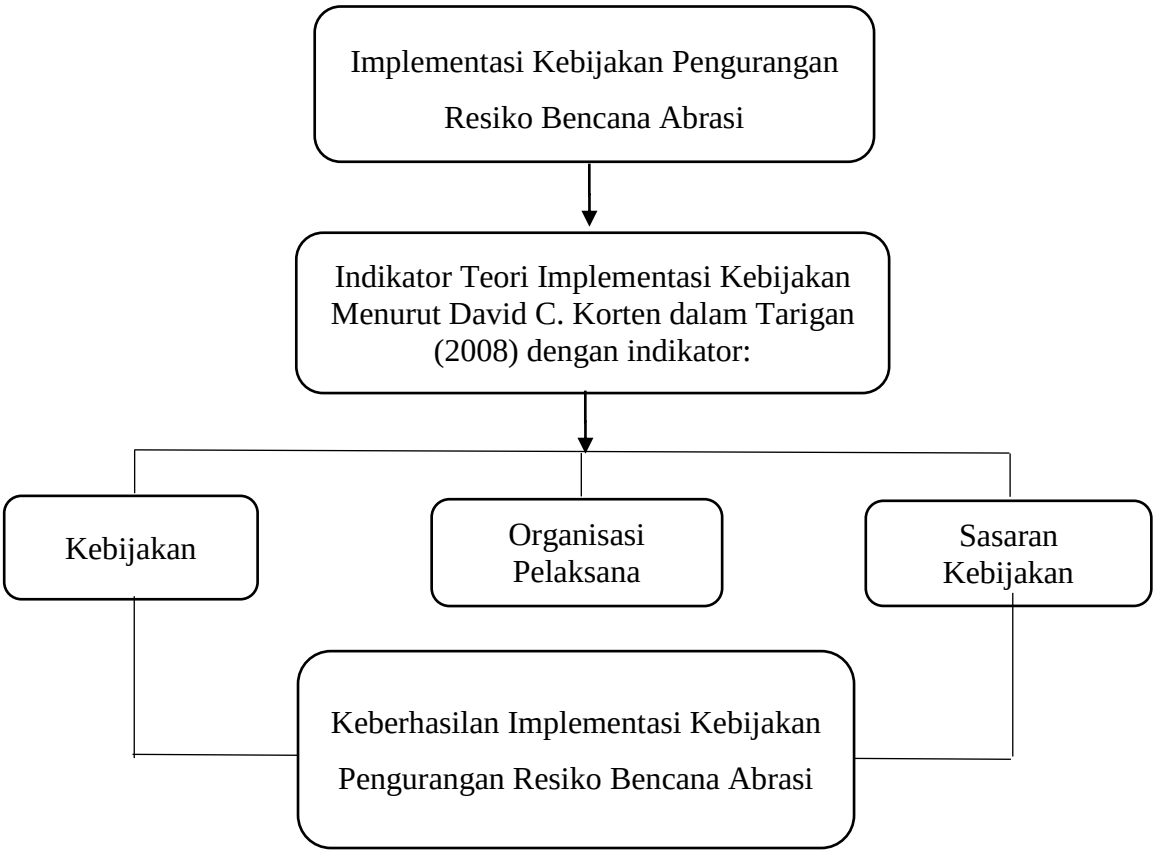

Sumber:Penulis, 2024

Gambar 2.2

Kerangka Berpikir